



Analisis Penggunaan SAK EMKM pada Toko Hani Mart Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli

Aprida Damayanti Br Sitanggang^{1*}, Mangasa Sinurat², Dame Ria R Saragih³

¹⁻³Universitas HKBP Nommensen Medan, Indonesia

Email: aprida.sitanggang@student.uhn.ac.id¹, mangasasinurat@uhn.ac.id², damesaragi@uhn.ac.id³

Penulis korespondensi: aprida.sitanggang@student.uhn.ac.id

Abstract. *This study aims to identify and analyze the implementation of the Financial Accounting Standards for Micro, Small, and Medium Entities (SAK EMKM) in the recording and preparation of financial statements at Toko Hani Mart, Mabar Village, Medan Deli District. This study employs a descriptive qualitative method with a case study approach. Data were obtained through interviews with the business owner and documentation of financial transactions covering fixed assets, liabilities, revenues, and expenses. The results show that Toko Hani Mart has not fully implemented SAK EMKM in preparing its financial statements, although daily sales transactions have been recorded using a point-of-sale application. The recognition and measurement of revenue and inventory are consistent with SAK EMKM, whereas the recognition and measurement of fixed assets remain inconsistent due to the absence of acquisition cost records and depreciation calculations. Toko Hani Mart has no liabilities, so its business activities are entirely financed by its own capital, satisfying the criteria for applying SAK EMKM as it has no public accountability. The identified inconsistencies stem from the owner's limited understanding of SAK EMKM and the absence of training or socialization regarding the standard. This study recommends the preparation of complete financial statements in accordance with SAK EMKM to support more accountable financial management.*

Keywords: SAK EMKM, financial statements, MSMEs, recognition, measurement, and presentation.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) dalam pencatatan dan penyusunan laporan keuangan pada Toko Hani Mart, Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara dengan pemilik usaha serta dokumentasi transaksi keuangan yang mencakup pos aset tetap, liabilitas, pendapatan, dan beban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Toko Hani Mart belum menerapkan SAK EMKM secara menyeluruh dalam menyusun laporan keuangannya, meskipun pencatatan transaksi penjualan harian telah dilakukan melalui aplikasi kasir. Pengakuan dan pengukuran unsur pendapatan dan persediaan telah sesuai dengan SAK EMKM, sedangkan pengakuan dan pengukuran aset tetap belum sesuai karena tidak tersedianya catatan biaya perolehan dan perhitungan penyusutan. Toko Hani Mart tidak memiliki liabilitas sehingga seluruh kegiatan usahanya dibiayai oleh modal sendiri dan memenuhi kriteria penggunaan SAK EMKM karena tidak memiliki akuntabilitas publik. Ketidaksesuaian yang ditemukan disebabkan oleh rendahnya pemahaman pemilik terhadap SAK EMKM serta belum adanya pelatihan maupun sosialisasi mengenai standar tersebut. Penelitian ini merekomendasikan penyusunan laporan keuangan yang lengkap sesuai SAK EMKM guna mendukung pengelolaan keuangan yang lebih akuntabel.

Kata Kunci: Laporan Keuangan; Pengakuan; Pengukuran Dan Penyajian; SAK EMKM; UMKM.

1. PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu bentuk kegiatan usaha produktif yang didirikan oleh individu maupun badan usaha dengan skala tertentu, sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 serta Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 dalam regulasi tersebut. Pengertian UMKM yaitu: Usaha Mikro yaitu entitas tanpa akuntabilitas publik yang signifikan yang memenuhi definisi dan kriteria usaha mikro sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, serta memenuhi kriteria tersebut sekurang-kurangnya selama dua tahun berurut-

turut. Usaha Kecil yaitu entitas tanpa akuntabilitas publik yang signifikan yang memenuhi kriteria usaha kecil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dan memenuhi kriteria tersebut minimal dua tahun berturut-turut. Usaha Menengah yaitu entitas tanpa akuntabilitas publik yang signifikan yang memenuhi definisi dan kriteria usaha menengah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, sekurang-kurangnya selama dua tahun berturut-turut. Usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah masing-masing memiliki karakteristik serta batasan tertentu terkait dengan kepemilikan aset, omset usaha, dan jumlah tenaga kerja. Keberadaan UMKM di Indonesia memiliki peran yang sangat signifikan dalam menunjang pertumbuhan ekonomi nasional khususnya pada sektor perdagangan yang terus mengalami perkembangan dan peningkatan jumlah pelaku usaha.

UMKM sering kali dipandang sebagai tulang punggung perekonomian nasional karena kemampuannya dalam bertahan di tengah berbagai kondisi ekonomi yang tidak stabil. Pada saat perusahaan-perusahaan berskala besar mengalami penurunan kinerja bahkan kebangkrutan akibat krisis ekonomi, UMKM justru mampu tetap beroperasi dan menopang aktivitas ekonomi masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa UMKM memiliki tingkat fleksibilitas dan daya adaptasi yang relative tinggi terhadap perubahan lingkungan ekonomi. Oleh karena itu, perkembangan UMKM dapat dijadikan sebagai salah satu indikator untuk mengukur tingkat aktivitas ekonomi masyarakat sekaligus sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal maupun nasional.

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya UMKM membutuhkan pengelolaan keuangan yang baik agar usaha dapat berjalan secara berkelanjutan. Salah satu bentuk pengelolaan keuangan yang penting adalah penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan disusun dengan tujuan untuk menyajikan informasi yang lengkap dan sistematis mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan serta arus kas suatu entitas dalam periode tertentu. Informasi yang terkandung dalam laporan keuangan tersebut sangat dibutuhkan oleh berbagai pihak yang berkepentingan, baik pihak internal maupun pihak eksternal, sebagai dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi yang rasional dan tepat.

Selain berfungsi sebagai sumber informasi laporan keuangan juga merupakan bentuk pertanggungjawaban manajemen atas pengelolaan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas usaha. Melalui laporan keuangan, pemilik UMKM dapat menilai sejauh mana efektivitas dan efisiensi pengelolaan usaha yang telah dilakukan. Oleh karena itu laporan keuangan memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung keberlangsungan dan perkembangan usah, khususnya bagi UMKM yang masih memiliki keterbatasan dalam aspek manajerial dan administratif.

Penyusunan laporan keuangan yang baik dan benar diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai alat pemisah antara keuangan pribadi dan keuangan usaha tetapi juga dapat membantu pemilik UMKM dalam merencanakan dan mengendalikan aktivitas usahanya. Dengan adanya laporan keuangan yang tersusun secara sistematis, pemilik usaha dapat dengan mudah memantau perkembangan usaha, mengetahui kondisi keuangan secara aktual, serta mengevaluasi pencapaian target usaha yang telah ditetapkan. Selain itu laporan keuangan juga dapat memberikan gambaran mengenai tingkat keuntungan yang diperoleh dari satu periode ke periode berikutnya, sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan strategis di masa yang akan datang.

Selain keterbatasan pengetahuan, banyak pemilik UMKM menganggap bahwa penyusunan laporan keuangan tidak terlalu penting selama usaha tetap berjalan. UMKM hanya membuat catatan sederhana mengenai pemasukan dan pengeluaran tanpa menyusun laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi. Akibatnya, pemilik usaha tidak dapat menilai kinerja usaha secara komprehensif. Padahal laporan keuangan berfungsi penting dalam pengambilan keputusan strategis, seperti penetapan harga jual, pengendalian biaya, dan akses pembiayaan.

Laporan keuangan yang sesuai standar juga merupakan syarat utama UMKM mengajukan pinjaman ke lembaga keuangan. Tanpa laporan yang memadai UMKM dapat mengalami kesulitan mengembangkan usaha. Padahal transaksi pada usaha cukup banyak sehingga memerlukan pencatatan yang akurat agar pengelolaan stok dan perolehan laba dapat dikendalikan dengan baik serta menghindari risiko barang hilang atau menumpuk.

Dalam Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) terdiri dari 18 BAB. SAK EMKM mulai efektif berlaku mulai tanggal 01 Januari 2018. Pentingnya dibuat SAK EMKM supaya penyajian laporan keuangan lebih sederhana, sebab unsur laporan keuangan hanya terdiri dari tiga yaitu: Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi, Catatan Atas Laporan Keuangan. Namun, tidak semua UMKM boleh menerapkan SAK EMKM. Karena UMKM dapat memilih SAK EMKM kalau memenuhi persyaratan dalam Bab 1 poin 1.2 disebutkan:

- a. Entitas mikro, kecil, dan menengah adalah entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik.
- b. Memenuhi definisi dan kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, setidaknya selama dua tahun berturut-turut.

Dalam pembahasan penyusunan laporan keuangan menurut SAK EMKM hendaknya memenuhi dalam Bab 2:

- a. Pengakuan Unsur Laporan Keuangan (2.12).
- b. Pengukuran Unsur Laporan Keuangan (2.15)
- c. Asumsi Dasar Akrua (2.19)
- d. Kelangsungan Usaha (2.20)
- e. Konsep Entitas Bisnis (2.21)

Di Indonesia, UMKM memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi, UMKM juga memiliki peranan yang sangat penting dalam menciptakan dan memperluas lapangan kerja. Melalui kegiatan usahanya, UMKM mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang cukup besar sehingga dapat membantu mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, keberadaan UMKM tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga memiliki dampak sosial yang signifikan, terutama dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan memperkuat struktur ekonomi. (Muhammad Cahyo Hermansyah & Dewi Sutjahyani, 2023) mencatat bahwa UMKM menyerap hingga 97% tenaga kerja dan menyumbang lebih dari 61% Produk Domestik Bruto (PDB). Kontribusi tersebut menunjukkan bahwa UMKM bukan hanya sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat, namun juga berperan sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi nasional.

Meskipun SAK EMKM telah ditetapkan dan diberlakukan, dalam praktiknya masih banyak UMKM yang belum sepenuhnya menerapkan standar tersebut dalam penyusunan laporan keuangannya. Hal ini tercermin dari berbagai hasil penelitian terdahulu yang menunjukkan adanya perbedaan tingkat penerapan SAK EMKM di kalangan UMKM. (Elvia & Satyanegara, 2025) menunjukkan bahwa sebagian besar UMKM masih mencatat transaksi secara manual dan sederhana sehingga tidak mampu menggambarkan kondisi finansial secara utuh. Rendahnya literasi akuntansi membuat laporan keuangan tidak disusun sesuai prinsip akuntansi, yang berdampak pada kurang tepatnya keputusan bisnis, misalnya ketidakmampuan mengidentifikasi biaya tersembunyi atau potensi keuntungan. (Ela dkk., 2023) menemukan bahwa pelaku usaha pakaian di Desa Sibolang belum memisahkan keuangan pribadi dan usaha serta belum menerapkan pencatatan berbasis akrual sebagaimana diwajibkan SAK EMKM. Pada penelitian (Mardijani, 2024) yang mendapati bahwa UMKM kuliner belum mampu menyusun laporan keuangan sesuai SAK EMKM karena kurangnya pendampingan dan edukasi akuntansi.

Pelaku UMKM sering lebih fokus pada kegiatan operasional sehingga mengabaikan fungsi pencatatan keuangan sebagai alat evaluasi kinerja usaha, seperti menilai efisiensi biaya bahan baku atau margin keuntungan. Rendahnya pemahaman terhadap standar akuntansi juga terjadi pada UMKM De Harvest Tomohon. (Joni & Manarinsong, 2023) menyimpulkan

bahwa pemilik usaha belum memahami pentingnya SAK EMKM serta belum pernah mendapat sosialisasi dari pihak terkait. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan standar sangat bergantung pada tingkat pengetahuan pelaku UMKM serta dukungan lembaga seperti pemerintah daerah atau asosiasi UMKM. Dalam penelitian (Muhammad Cahyo Hermansyah & Dewi Sutjahyani, 2023) menyimpulkan bahwa masalah ini juga dialami oleh UMKM err 88 Surabaya, di mana pencatatan dilakukan secara sederhana tanpa memerhatikan prinsip dasar penyusunan laporan keuangan.

Salah satu UMKM di Kota Medan yang mengalami permasalahan tersebut adalah Toko Hani Mart di Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli. Usaha ini menjual berbagai kebutuhan rumah tangga dan barang harian. Berdasarkan pencatatan awal, Toko Hani Mart telah menggunakan aplikasi dalam melakukan pencatatan transaksi dan penyusunan laporan keuangan. Namun, penggunaan aplikasi tersebut belum sepenuhnya menjamin bahwa laporan keuangan yang dihasilkan telah sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM).

Fenomena yang terjadi pada Toko Hani Mart menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan usaha belum dilakukan secara optimal sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM). Meskipun pencatatan transaksi telah dilakukan dengan bantuan aplikasi, masih perlu dikaji apakah laporan keuangan yang dihasilkan telah memenuhi aspek pengakuan, pengukuran, dan penyajian sesuai dengan SAK EMKM. Selain itu, masih terdapat pencampuran antara keuangan pribadi dan usaha, sehingga informasi keuangan yang dihasilkan belum akurat dan belum dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan yang tepat.

Pemilik Toko Hani Mart belum memisahkan keuangan pribadi dan usaha, sehingga sulit mengetahui pendapatan bersih sebenarnya. Akibatnya, pemilik tidak dapat mengevaluasi perkembangan usaha secara akurat, misalnya menentukan laba bersih setelah pajak atau mengidentifikasi pengeluaran pribadi yang tercampur. Selain itu, berdasarkan wawancara awal pemilik Toko Hani Mart mengakui belum memahami cara menyusun laporan keuangan sesuai standar, belum pernah mengikuti pelatihan terkait SAK EMKM. Hal ini membuat pencatatan hanya sebatas arus kas masuk dan keluar tanpa mengetahui posisi aset, kewajiban, maupun modal. Situasi tersebut menunjukkan rendahnya literasi akuntansi yang menghambat penerapan pengelolaan keuangan yang baik, termasuk penggunaan perangkat lunak sederhana.

Kondisi tersebut menimbulkan berbagai risiko seperti salah perhitungan laba, pencatatan stok yang tidak akurat, serta ketidakmampuan melakukan evaluasi usaha. Laporan keuangan yang tidak sesuai SAK EMKM menjadikan UMKM rentan membuat keputusan yang keliru

karena informasi keuangan tidak mencerminkan keadaan sebenarnya, misalnya perhitungan keuntungan yang terlalu tinggi atau estimasi risiko yang terlalu rendah.

Kesenjangan dalam penelitian ini terletak pada adanya perbedaan antara ketentuan dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) yang mengharuskan penyusunan laporan keuangan secara lengkap dan sistematis, dengan praktik yang terjadi pada Toko Hani Mart yang telah menggunakan aplikasi pencatatan keuangan, namun masih perlu dianalisis tingkat kesesuaiannya dengan ketentuan SAK EMKM.

Berdasarkan berbagai temuan tersebut, dapat dikemukakan bahwa masalah utama dalam pengelolaan keuangan UMKM bukan hanya keterbatasan teknis, tetapi juga kurangnya pemahaman terhadap standar akuntansi yang berlaku. SAK EMKM seharusnya menjadi alat untuk membantu UMKM menyusun laporan keuangan yang lebih struktur, namun keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh tingkat literasi akuntansi serta kebutuhan akan edukasi dan sosialisasi berkelanjutan.

Dengan demikian perlu diteliti untuk beberapa akun laporan keuangan yang sangat penting diperhatikan apabila menggunakan SAK EMKM, dalam menyusun laporan keuangan. Oleh sebab itu perlu dibuat pembahasan dari segi prinsip dan kebijakan akuntansi, pengakuan dan pengukuran beberapa pos perkiraan seperti: asset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, beban, dan pph final.

Sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut untuk menganalisis bagaimana penerapan SAK EMKM pada UMKM Toko Hani Mart dalam bentuk penelitian dengan judul ANALISIS PENGGUNAAN SAK EMKM PADA TOKO HANI MART, KELURAHAN MABAR, KECAMATAN MEDAN DELI.

2. METODE

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan dua teknik yaitu wawancara dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data bertujuan untuk memperoleh data yang lebih mendalam serta meningkatkan keabsahan hasil penelitian (Sugiyono, 2023: 297).

Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi secara langsung dari pemilik toko hani mart. Melalui wawancara, peneliti dapat menggali pemahaman, pengalaman, serta kendala yang dihadapi pelaku usaha dalam mengelola usahanya. Wawancara dilakukan secara fleksibel dengan pertanyaan terbuka, sehingga pemilik dapat menyampaikan informasi, pengalaman, dan pandangan secara bebas. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data yang lebih mendalam dan mampu menggambarkan kondisi objek penelitian secara komprehensif.

Dokumentasi digunakan untuk mencatat kembali transaksi keuangan yang sudah ada di dalam perusahaan untuk diolah, yang mau dicatat yaitu pos-pos tertentu yang menyangkut asset tetap, liabilitas, pendapatan, dan beban.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Konsep Entitas Bisnis

Konsep entitas bisnis dalam SAK EMKM mengharuskan suatu usaha dipandang sebagai kesatuan yang terpisah dari pemiliknya, sehingga hanya transaksi yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang dicatat dalam laporan keuangan, sedangkan transaksi yang bersifat pribadi tidak boleh tercampur di dalamnya. Berdasarkan hasil wawancara, pemilik Toko Hani Mart menyatakan bahwa keuangan pribadi dan keuangan usaha sudah dipisahkan dalam hal arus kas harian, yaitu uang hasil penjualan tidak langsung digunakan untuk kebutuhan pribadi tanpa pencatatan berarti memenuhi syarat menggunakan SAK EMKM. Akan tetapi, pada sisi kepemilikan aset, ditemukan bahwa pemilik masih menyebutkan mobil, tanah, dan rumah sebagai bagian dari aset yang dimilikinya tanpa memisahkan secara tegas mana yang merupakan aset usaha dan mana yang merupakan harta pribadi. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan konsep entitas bisnis pada Toko Hani Mart belum dilakukan secara konsisten dan menyeluruh. Pemisahan yang telah dilakukan baru sebatas pada arus kas transaksi harian toko, sedangkan pemisahan aset secara akuntansi antara milik pribadi dan milik usaha belum diterapkan sepenuhnya.

Hal tersebut sejalan dengan karakteristik UMKM pada umumnya yang masih dikelola secara terpusat oleh pemilik tanpa pemisahan administrasi yang tegas antara kepentingan pribadi dan kepentingan usaha. Apabila konsep entitas bisnis ini tidak diterapkan secara konsisten, maka informasi keuangan yang dihasilkan berisiko tidak menggambarkan kondisi usaha yang sebenarnya, sebab aset pribadi yang tidak digunakan untuk kegiatan operasional toko, seperti rumah dan tanah, semestinya tidak dimasukkan sebagai bagian dari aset usaha dalam laporan posisi keuangan Toko Hani Mart.

Pengakuan Unsur Laporan Keuangan

Pengakuan merupakan proses pencatatan suatu pos ke dalam laporan posisi keuangan atau laporan laba rugi apabila pos tersebut memenuhi definisi unsur laporan keuangan dan memiliki kemungkinan manfaat ekonomi yang dapat diukur secara andal. Analisis kesesuaian pengakuan unsur laporan keuangan pada Toko Hani Mart dengan ketentuan SAK EMKM dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Pengakuan Unsur Laporan Keuangan Toko Hani Mart.

No	Berdasarkan SAK EMKM	Menurut Toko Hani Mart	Kesesuaian
1	Entitas mengakui aset hanya ketika aset tersebut memberikan manfaat ekonomi di masa depan bagi entitas.	Toko Hani Mart mengakui aset tetap (rak, kulkas, komputer kasir) sebagai bagian dari sumber daya usaha, namun belum dicatat dalam pembukuan akuntansi tersendiri.	Belum Sesuai
2	Entitas mengakui liabilitas hanya ketika timbul kewajiban dari peristiwa masa lalu yang harus diselesaikan di kemudian hari.	Toko Hani Mart tidak memiliki liabilitas (utang usaha maupun utang bank), sehingga tidak terdapat pos liabilitas yang diakui.	Sesuai
3	Entitas mengakui pendapatan dari penjualan barang ketika barang telah dijual kepada pelanggan.	Pendapatan diakui pada saat transaksi penjualan terjadi dan tercatat otomatis melalui sistem aplikasi kasir	Sesuai
4	Entitas mengakui persediaan ketika diperoleh, sebesar biaya perolehannya.	Persediaan diakui sebesar biaya perolehan dari pemasok, tercermin pada kolom HPP dalam laporan sistem kasir.	Sesuai
5	Beban diakui pada saat terjadi atau pada saat kas dibayarkan	Beban dicatat terpisah dari pendapatan dalam sistem kasir, namun rincian jenis beban operasional tidak terdokumentasi secara lengkap.	Cukup Sesuai

Sumber: Data diolah oleh penulis.

Berdasarkan tabel 4.1, dapat dijelaskan bahwa pengakuan pendapatan pada Toko Hani Mart telah sesuai dengan ketentuan SAK EMKM, yaitu diakui pada saat barang telah dijual dan diterima pembayarannya secara tunai melalui sistem kasir, sehingga pendapatan diakui secara langsung pada saat transaksi terjadi.

Pengakuan persediaan pada Toko Hani Mart juga telah sesuai dengan SAK EMKM, sebab persediaan barang dagangan diakui sebesar biaya perolehannya pada saat barang diterima dari pemasok, yang tercermin dari adanya unsur Harga Pokok Penjualan (HPP) dalam laporan yang dihasilkan sistem.

Sedangkan, pengakuan aset tetap pada Toko Hani Mart belum dapat dikatakan sesuai secara penuh dengan SAK EMKM. Meskipun toko telah memiliki aset tetap berupa rak penjualan, lemari pendingin, dan unit komputer kasir yang digunakan untuk operasional usaha, pemilik belum melakukan pencatatan dan pengakuan secara khusus atas aset-aset tersebut dalam suatu pembukuan akuntansi, melainkan hanya mengetahui keberadaannya secara fisik. Selain itu, pencampuran antara aset usaha dengan aset pribadi seperti mobil, tanah, dan rumah menyebabkan pengakuan aset tetap usaha menjadi tidak jelas batasannya.

Pada aspek liabilitas, oleh karena Toko Hani Mart tidak memiliki utang baik kepada pemasok maupun kepada lembaga keuangan, maka tidak terdapat pos liabilitas yang perlu diakui dalam laporan keuangan usaha ini. Kondisi tidak adanya liabilitas ini sejalan dengan

ketentuan SAK EMKM, sebab pengakuan liabilitas memang hanya dilakukan apabila timbul kewajiban yang harus diselesaikan di kemudian hari, dan dalam hal ini Toko Hani Mart tidak memiliki kewajiban tersebut sehingga seluruh modal usahanya berasal dari modal sendiri.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa pengakuan unsur pendapatan dan persediaan pada Toko Hani Mart sudah cukup sesuai dengan SAK EMKM, sedangkan pengakuan atas aset tetap masih perlu diperbaiki melalui pemisahan yang jelas antara aset usaha dan aset pribadi pemilik.

Pengukuran Unsur Laporan Keuangan

Pengukuran merupakan proses penetapan jumlah moneter atas aset, liabilitas, pendapatan, dan beban dalam laporan keuangan. SAK EMKM mensyaratkan penggunaan dasar biaya historis dalam pengukuran, yaitu sebesar kas atau setara kas yang dikeluarkan atau diterima pada saat transaksi terjadi. Beberapa perkiraan menggunakan metode pengukuran tertera pada tabel 2.

Tabel 2. Perkiraan menggunakan Metode Pengukuran.

No	Berdasarkan SAK EMKM	Menurut Toko Hani Mart	Kesesuaian
1	Aset tetap diukur sebesar biaya perolehan dan disusutkan menggunakan metode garis lurus.	Toko Hani Mart tidak memiliki catatan biaya perolehan maupun perhitungan penyusutan atas aset tetap yang dimiliki.	Belum Sesuai
2	Liabilitas diukur sebesar biaya perolehan atau harga transaksi pada saat timbulnya kewajiban.	Tidak terdapat liabilitas pada Toko Hani Mart sehingga tidak ada pos yang diukur.	Tidak Berlaku
3	Persediaan diukur sebesar biaya perolehan, meliputi biaya pembelian dan biaya terkait lainnya.	Persediaan diukur sebesar HPP yang tercermin dalam laporan sistem kasir setiap harinya.	Sesuai
4	Pendapatan diukur sebesar nilai transaksi (jumlah kas) yang diterima dari pelanggan.	Pendapatan diukur sebesar omset harian yang tercatat dalam sistem kasir sesuai jumlah uang yang diterima.	Sesuai
5	Beban diukur sebesar jumlah kas atau setara kas yang dikeluarkan sehubungan dengan kegiatan operasional	Toko Hani Mart belum memiliki catatan atau rincian atas beban operasional.	Belum Sesuai

Sumber: Data diolah oleh penulis.

Pengukuran aset tetap pada Toko Hani Mart belum dapat dipastikan kesesuaiannya dengan SAK EMKM, sebab pemilik tidak memiliki catatan mengenai harga perolehan masing-masing aset tetap yang digunakan untuk usaha, seperti rak penjualan, lemari pendingin, dan komputer kasir. Tanpa adanya catatan biaya perolehan dan belum dilakukannya perhitungan penyusutan, maka nilai aset tetap usaha tidak dapat diukur secara andal sebagaimana yang disyaratkan SAK EMKM.

Pengukuran persediaan dilakukan berdasarkan biaya perolehan barang dagangan yang dibeli dari pemasok, yang tercermin pada kolom HPP dalam laporan toko. Toko Hani Mart

secara tidak langsung telah menerapkan pengukuran biaya historis untuk persediaannya, karena nilai HPP yang tercatat mencerminkan biaya perolehan barang yang terjual pada periode tersebut. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan SAK EMKM mengenai pengukuran persediaan.

Pengukuran pendapatan pada Toko Hani Mart dilakukan berdasarkan jumlah uang yang diterima dari pelanggan pada saat transaksi penjualan terjadi, sebagaimana tercermin dalam kolom omset pada laporan penjualan harian toko. Pengukuran ini telah sesuai dengan SAK EMKM yang mensyaratkan pendapatan diukur sebesar nilai transaksi yang sebenarnya diterima oleh entitas.

Pengukuran beban pada Toko Hani Mart belum sesuai dengan SAK EMKM, sebab pemilik tidak memiliki catatan atau rincian mengenai beban operasional usaha maupun beban penyusutan aset tetap. Laporan yang dihasilkan oleh sistem Aplikasi Kasir hanya memuat kolom omset dan Harga Pokok Penjualan (HPP), sehingga belum mencerminkan seluruh beban yang seharusnya diukur dan dibebankan pada periode berjalan sebagaimana diisyaratkan SAK EMKM, yaitu sebesar kas atau setara kas yang dikeluarkan sehubungan dengan operasional entitas. Akibatnya, angka laba yang dapat dihitung dari laporan yang tersedia hanya berupa laba kotor, dan belum dapat mencerminkan laba bersih usaha.

Oleh karena Toko Hani Mart tidak memiliki liabilitas, maka tidak terdapat pos liabilitas yang perlu diukur dalam laporan keuangan usaha ini.

Berdasarkan uraian tersebut, pengukuran pada Toko Hani Mart dapat dikategorikan cukup sesuai dengan SAK EMKM pada unsur pendapatan dan persediaan, namun belum sesuai pada unsur aset tetap karena ketiadaan dokumentasi biaya perolehan dan penyusutan aset.

Penyajian Unsur Laporan Keuangan

SAK EMKM mensyaratkan entitas untuk menyusun laporan keuangan minimum yang terdiri atas tiga komponen, yaitu Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Tabel 3. Penyajian Unsur Laporan Keuangan TokoHani Mart.

No	Komponen Laporan Keuangan Menurut SAK EMKM	Kondisi pada Toko Hani Mart	Kesesuaian
1	Laporan Posisi Keuangan yang memuat kelompok aset, liabilitas, dan ekuitas.	Belum disusun. Toko hanya memiliki Laporan Penjualan dan Omset Perbulan dari sistem kasir.	Tidak Sesuai
2	Laporan Laba Rugi yang memuat pendapatan, beban, dan laba/rugi periode.	Belum disusun secara utuh. Tersedia data omset dan HPP, namun beban operasional lain tidak tercatat secara rinci.	Belum Sesuai
3	Catatan Atas Laporan Keuangan yang memuat kebijakan akuntansi dan rincian akun material.	Belum disusun sama sekali oleh Toko Hani Mart.	Tidak Sesuai

Sumber: Data diolah oleh penulis.

Berdasarkan hasil penelitian, Toko Hani Mart selama ini belum menyajikan laporan keuangan dalam bentuk Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi, maupun Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana yang disyaratkan SAK EMKM. Laporan yang dimiliki dan dapat diakses oleh peneliti hanya berupa Laporan Penjualan dan Omset Perbulan yang dihasilkan oleh aplikasi kasir, yang memuat kolom tanggal, omset, HPP, margin persentase, margin rupiah, dan total struk. Laporan tersebut pada dasarnya hanya menggambarkan ringkasan hasil penjualan harian dan belum mencakup penyajian aset, liabilitas, dan ekuitas secara terstruktur sebagaimana layaknya laporan posisi keuangan, serta belum memisahkan pendapatan dan beban operasional secara rinci sebagaimana layaknya laporan laba rugi.

Berdasarkan data Laporan Penjualan dan Omset Perbulan periode April 2026 yang diperoleh peneliti, dapat disusun gambaran sederhana mengenai hasil usaha Toko Hani Mart selama satu bulan sebagai berikut.

Tabel 4. Hasil Usaha Toko Hani Mart Periode Bulan April 2026.

Uraian	Jumlah
Omset (Penjualan)	292.933.000
Harga Pokok Penjualan (HPP)	(252.726.675)
Laba Kotor	40.206.325
Rata-Rata Margin	13,73%

Sumber: Data diolah oleh penulis berdasarkan Laporan Penjualan dan Omset Perbulan Toko Hani Mart, Bulan April 2026.

- a. Laba Kotor = Omset-Harga Pokok Penjualan (HPP)

$$\text{Laba Kotor} = \text{Rp } 292.933.000 - \text{Rp } 252.726.675 = \text{Rp } 40.206.325$$

- b. Rata-Rata Margin = (Laba Kotor/Omset) $\times$ 100%

$$\text{Rata-Rata Margin} = (\text{Rp } 40.206.325 / \text{Rp } 292.933.000) \times 100\% = 13,73\%$$

- c. Rata-Rata Omset Harian = Omset/Jumlah Hari Dalam Bulan April Rata-Rata Omset

$$\text{Harian} = \text{Rp } 292.933.000 / 30 \text{ hari} = \text{Rp } 9.764.433$$

Berdasarkan data tersebut, selama bulan April 2026 Toko Hani Mart memperoleh omset sebesar Rp292.933.000 dengan harga pokok penjualan sebesar Rp252.726.675, sehingga diperoleh laba kotor sebesar Rp40.206.325 atau setara dengan margin rata-rata sebesar 13,73 persen dari omset, dengan rata-rata omset harian sekitar Rp9.764.433. Perlu ditegaskan bahwa angka laba kotor tersebut belum dikurangkan dengan beban operasional lain seperti beban gaji karyawan, beban listrik, beban sewa, maupun beban penyusutan aset tetap, sebab data mengenai rincian beban-beban tersebut tidak diperoleh peneliti dari pemilik. Dengan demikian, angka tersebut hanya menggambarkan laba kotor usaha dan belum dapat dikatakan sebagai laba bersih sebagaimana yang seharusnya disajikan dalam laporan laba rugi menurut SAK EMKM.

Toko Hani Mart juga menetapkan kebijakan pencatatan atas aset tetap dan persediaan barang dagangan yang dimiliki. Toko Hani Mart memiliki aset tetap berupa 1 (satu) unit mobil Avanza yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional usaha, dengan harga perolehan sebesar Rp 230.000.000. Atas aset tetap tersebut, Toko Hani Mart menetapkan nilai residu sebesar Rp 23.000.000 dan masa manfaat ekonomis selama 10 (sepuluh) tahun, dengan beban penyusutan yang dihitung menggunakan metode garis lurus.

Perhitungannya:

$$\text{Depresiasi Tahunan} = \frac{\text{Harga Perolehan}-\text{Nilai Residu}}{\text{Manfaat Ekonomi}}$$

$$\text{Depresiasi Tahunan} = \frac{\text{Rp } 230.000.000 - \text{Rp } 23.000.000}{10 \text{ Tahun}} = \text{Rp } 20.700.000$$

Apabila Toko Hani Mart menerapkan kebijakan penyusutan aset tetap tersebut secara konsisten sesuai dengan SAK EMKM, maka beban penyusutan itu seharusnya turut diperhitungkan sebagai pengurang laba kotor usaha dalam laporan laba rugi periode berjalan, sehingga angka laba yang dihasilkan dapat mencerminkan laba bersih yang lebih andal.

Keterbatasan tersebut menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan Toko Hani Mart masih jauh dari ketentuan SAK EMKM, baik dari segi kelengkapan komponen laporan maupun dari segi kerincian pos-pos yang disajikan. Toko Hani Mart belum menyajikan laporan posisi keuangan yang memuat kelompok aset, liabilitas, dan ekuitas usahanya, serta belum menyusun catatan atas laporan keuangan yang seharusnya memuat kebijakan akuntansi dan rincian akun-akun material lainnya.

Kemudian persediaan barang dagangan, Toko Hani Mart menetapkan harga perolehan persediaan berdasarkan harga per satuan barang pada saat pembelian dari pemasok, bukan berdasarkan harga per kilogram. Salah satu barang dagangan utama yang dijual, yaitu beras,

dicatat sebesar harga per karung yang dibayarkan toko kepada pemasok pada tanggal transaksi pembelian dilakukan. Oleh karena harga pembelian beras dari pemasok berbeda-beda pada setiap periode pembelian, Toko Hani Mart menggunakan metode rata-rata tertimbang dalam menentukan biaya perolehan persediaan, sebagaimana disyaratkan oleh SAK EMKM. Adapun data pembelian persediaan barang dagangan beras untuk dibahas tertera pada tabel 5. Berdasarkan data pembelian beras pada tabel 5 bahwa biaya perolehan persediaan beras dengan metode rata-rata tertimbang dihitung dengan membagi total harga pembelian dengan total jumlah karung yang dibeli selama periode tersebut.

Tabel 5. Persediaan Beras Toko Hani Mart Periode Bulan April 2026.

Tanggal	Jumlah (Karung)	Harga Per Karung (10 kg)	Total
19 April 2026	60	Rp 140.000	Rp 8.400.000
26 April 2026	30	Rp 138.000	Rp 4.140.000
Total	90		Rp 12.540.000

Sumber: Data Diolah oleh Penulis.

Dengan demikian total nilai Rp 12.540.000 dibagi dengan 90 karung, dapat diperoleh harga rata-rata tertimbang sebesar Rp 139.333,33 per karung. Harga rata-rata tertimbang tersebut digunakan Toko Hani Mart sebagai dasar penentuan biaya perolehan persediaan beras yang masih tersisa pada neraca. Sedangkan pada akhir periode maupun sebagai dasar perhitungan harga pokok penjualan atas beras yang telah terjual selama periode berjalan dapat dihitung sebagai beban sebesar jumlah karung yang terjual dikali harga Rp 139.333,33 per karung. Dengan penerapan metode tersebut, Toko Hani Mart tetap dapat menentukan biaya perolehan persediaan lebih relevan meskipun harga pembelian dari pemasok berubah-ubah pada setiap periode pembelian.

Keterkaitan Teori dan Hasil Penelitian dengan Penerapan SAK EMKM pada Toko Hani Mart

Hasil analisis di atas menunjukkan bahwa Toko Hani Mart, sebagai salah satu UMKM di bidang perdagangan, belum menerapkan SAK EMKM dalam menyusun laporan keuangannya. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian terdahulu yang dikemukakan oleh (Elvia & Satyanegara, 2025) maupun (Joni & Manaroinsong, 2023), yang menyatakan bahwa sebagian besar UMKM masih melakukan pencatatan transaksi secara sederhana dan belum sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, dikarenakan keterbatasan pemahaman pemilik usaha terhadap SAK EMKM serta belum adanya sosialisasi dari pihak terkait.

Pada Toko Hani Mart, ditemukan bahwa pencatatan transaksi penjualan sehari-hari sebenarnya sudah cukup baik karena dibantu oleh sistem aplikasi kasir yang mampu merekam data secara otomatis dan akurat. Namun, format laporan yang dihasilkan sistem tersebut tidak dirancang berdasarkan kerangka SAK EMKM, melainkan hanya berorientasi pada kebutuhan

operasional toko sehari-hari, yaitu untuk mengetahui omset, HPP, margin keuntungan, dan jumlah transaksi. Akibatnya, meskipun data transaksi yang dimiliki cukup lengkap dari sisi penjualan, Toko Hani Mart tetap belum memiliki laporan posisi keuangan, laporan laba rugi yang lengkap, maupun catatan atas laporan keuangan sebagaimana yang dipersyaratkan SAK EMKM.

Penerapan konsep entitas bisnis pada Toko Hani Mart juga belum dilakukan secara konsisten, terutama dalam hal pemisahan aset usaha dan aset pribadi pemilik. Kondisi ini memperkuat temuan (Ela et al., 2023) yang menyatakan bahwa pelaku UMKM pada umumnya masih kesulitan memisahkan harta pribadi dengan harta usaha secara tegas, meskipun secara arus kas harian pemisahan tersebut sudah mulai diterapkan.

Di sisi lain, kondisi Toko Hani Mart yang tidak memiliki utang usaha maupun utang bank menunjukkan bahwa usaha ini dijalankan secara mandiri dengan modal sendiri, sehingga struktur permodalannya menjadi relatif sederhana dibandingkan UMKM lain yang memanfaatkan pembiayaan eksternal. Hal ini sejalan dengan unsur liabilitas dalam SAK EMKM, yaitu pengakuan liabilitas hanya dilakukan apabila terdapat kewajiban yang timbul dari peristiwa masa lalu, dan dalam hal ini Toko Hani Mart tidak memiliki kewajiban tersebut.

Secara keseluruhan, penggunaan SAK EMKM pada Toko Hani Mart masih bersifat parsial, yaitu hanya terlihat pada aspek pengakuan dan pengukuran pendapatan serta persediaan yang sudah cukup sejalan dengan prinsip dasar SAK EMKM melalui bantuan sistem aplikasi kasir, namun belum diterapkan secara menyeluruh pada aspek pengakuan dan pengukuran aset tetap, serta belum diterapkan sama sekali pada aspek penyajian laporan keuangan dalam bentuk laporan posisi keuangan, laporan laba rugi yang lengkap, dan catatan atas laporan keuangan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) pada Toko Hani Mart, dapat disimpulkan bahwa Toko Hani Mart belum menerapkan SAK EMKM secara menyeluruh dalam penyusunan laporan keuangannya. Meskipun demikian, pencatatan transaksi penjualan harian telah dilakukan dengan memanfaatkan teknologi melalui Aplikasi Kasir sehingga seluruh transaksi penjualan dapat tercatat secara sistematis. Namun, pencatatan tersebut masih sebatas mengikuti format yang tersedia pada aplikasi dan belum disusun berdasarkan ketentuan yang diatur dalam SAK EMKM.

Penerapan konsep entitas bisnis di Toko Hani Mart juga belum dilakukan secara konsisten. Pemisahan antara keuangan pribadi dan keuangan usaha baru diterapkan pada arus

kas transaksi harian, sedangkan aset usaha dan aset pribadi pemilik, seperti mobil, tanah, dan rumah, masih belum dipisahkan secara jelas. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa prinsip entitas bisnis belum sepenuhnya diterapkan dalam pengelolaan keuangan usaha.

Pada aspek pengakuan dan pengukuran, Toko Hani Mart telah menerapkan praktik yang cukup sesuai dengan SAK EMKM untuk unsur pendapatan dan persediaan. Pendapatan dan persediaan diakui serta diukur berdasarkan nilai transaksi yang sebenarnya melalui sistem kasir. Akan tetapi, pengakuan dan pengukuran aset tetap masih belum sesuai dengan ketentuan SAK EMKM karena pemilik belum memiliki catatan mengenai biaya perolehan aset tetap maupun perhitungan penyusutannya. Dalam penelitian ini telah dilakukan simulasi perhitungan nilai aset tetap berupa mobil untuk disajikan dalam laporan posisi keuangan (neraca). Selain itu, juga dilakukan simulasi perhitungan nilai persediaan beras yang akan dicatat dalam neraca serta perhitungan harga pokok penjualan menggunakan metode rata-rata tertimbang pada laporan laba rugi sesuai dengan ketentuan SAK EMKM.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa Toko Hani Mart tidak memiliki liabilitas, baik berupa utang usaha kepada pemasok maupun utang kepada lembaga keuangan. Seluruh kegiatan operasional usaha dibiayai menggunakan modal sendiri sehingga usaha ini tidak memiliki akuntabilitas publik dan memenuhi kriteria sebagai entitas yang dapat menerapkan SAK EMKM. Dengan kondisi tersebut, total aset yang dimiliki sama dengan total ekuitas perusahaan.

Selain itu, rendahnya penerapan SAK EMKM di Toko Hani Mart dipengaruhi oleh kurangnya pengetahuan pemilik mengenai standar akuntansi tersebut. Pemilik belum pernah mempelajari maupun memperoleh pelatihan atau sosialisasi terkait penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM. Akibatnya, penyusunan laporan keuangan masih berpedoman pada format yang disediakan oleh Aplikasi Kasir tanpa didasarkan pada pemahaman terhadap prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan pemahaman melalui pelatihan atau pendampingan agar penyusunan laporan keuangan di Toko Hani Mart dapat sesuai dengan ketentuan SAK EMKM.

DAFTAR PUSTAKA

- Aidilla Syarli, Z., & Al Sukri, S. (2025). Analisis Pemahaman Pelaku Umkm Pada Pembuatan Laporan Keuangan Berbasis Sak Emkm. *Jurnal Lentera Bisnis*, 14(2), 2820–2828. <https://doi.org/10.34127/jrlab.v14i2.1684>
- Aini, F. Q., Arisyanada, M. S., & Mas'adah, N. (2025). Analisis Penerapan Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK

- EMKM) pada Umkm Martina Rasa Cake dan Bakery. *JAKUMA : Jurnal Akuntansi Dan Manajemen Keuangan*, 6(1), 91–96. <https://doi.org/10.31967/jakuma.v6i1.1505>
- Arafuri, Y., Akuntansi, P. S., & Akuntansi, P. S. (2024). ANALISIS PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN MENGGUNAKAN SAK EMKM (STUDI KASUS PADA UMKM TOKO YOUTHLAND SNEAKER ' S) *Journal of Islamic Finance and Accounting Research. Journal of Islamic Finance and Accounting*, 3(2), 126–137.
- Aryana, K. P., & Hasan, A. N. (2023). Sustainable Jurnal Akuntansi. *Sustainable Jurnal Akuntansi*, 3(2), 282–300. <https://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/sustainable/index>
- Ela, Munayang, O. H., & Zuhroh, S. (2023). Analisis Penerapan SAK EMKM pada Usaha Toko Pakaiandi Desa Siboang Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 6(9), 1167–1173. <https://doi.org/10.56338/jks.v6i9.4087>
- Elvia, M., & Satyanegara, E. (2025). Arus Jurnal Sosial dan Humaniora (AJSH) Representasi Shuudan Shugi dalam Penyelenggaraan. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora (AJSH)*, 1(5), 1–6. <http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>
- Fatah Maulana, R., & Apriliawati, Y. (2022). Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan SAK EMKM Pada Toko Grosir Hasanah. *Indonesian Accounting Literacy Journal*, 3(01), 761–772. <https://doi.org/10.35313/ialj.v2i04.3312>
- Fitri Yani & Zikri Aidilla Syarli. (2023). *Studi Pemahaman UMKM Atas Pembuatan Laporan Keuangan Berbasis Sak Emkm : UMKM Kecamatan Rumbai Pekanbaru*. 3202–3219.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2024). *SAK STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN INDONESIA UNTUK ENTITAS MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH*. IAI.
- Istinasari, Ngago, & Aprillianti. (2021). *PENERAPAN LAPORAN KEUANGAN BERBASIS SAK EMKM SEBAGAI SISTEM PENGEMBANGAN KINERJA KEUANGAN (Studi Kasus UMKM Fedcacare)*. 19(3), 599–607.
- Joni, J., & Manaroinsong, J. (2023). Analisis Sistem Pelaporan Keuangan Sesuai Sak Emkm Pada Umkm De Harvest Tomohon. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 4(1), 149–156. <https://doi.org/10.53682/jaim.vi.4248>
- Kalsum, U., Ikhtiari, K., Dwiyantri, R., & Indonesia, U. M. (2020). Laporan Keuangan Umkm Di Food City Pasar. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen*, 3(2), 92–103. <https://doi.org/10.35326/jiam.v3i2>
- Mardijani, P. (2024). Jurnal Akuntansi dan Ekonomi. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi Bisnis*, 2(1), 127–178.
- Muhammad Cahyo Hermansyah, & Dewi Sutjahyani. (2023). Analisis Penerapan Laporan Keuangan Berbasis SAK – EMKM Pada UMKM Merr 88 Surabaya Tahun 2021. *Journal of Student Research*, 1(2), 203–236. <https://doi.org/10.55606/jsr.v1i2.991>
- Sugiyono. (2019). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF KUALITATIF dan R&D*.
- Sugiyono. (2023). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF KUALITATIF dan R&D*.
- Sugiyono. (2017). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF DAN R & D*.